

KENDALA-KENDALA PELAKSANAAN EVALUASI DIRI SEKOLAH (EDS)

PROBLEMS ON THE IMPLEMENTATION OF SCHOOL SELF-EVALUATION (SSE)

Hendarman

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemdikbud
Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Pakuan Bogor

e-mail: hendarman@kemdikbud.go.id dan hendarmananwar@gmail.com

Naskah diterima tanggal: 10/02/2014; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 21/02/2014; Disetujui tanggal: 12/03/2014

Abstrak: Penelitian ini terkait dengan pelaksanaan evaluasi diri sekolah (EDS) dengan dua tujuan, yaitu: (1) mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan EDS; dan (2) mengidentifikasi solusi alternatif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah meta-analysis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner terbuka yang diberikan kepada guru dan kepala sekolah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berasal dari Bogor, Sukabumi, Bekasi dan Depok. Data sekunder bersumber dari panduan pelaksanaan EDS di beberapa negara, media, dokumen resmi peraturan perundang-undangan, dan laporan hasil-hasil studi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi meliputi aspek konsep, instrumen, infrastruktur, sumber daya manusia, dan administrasi. Kendala-kendala tersebut muncul sebagai akibat belum dilakukan sosialisasi secara benar, belum adanya komitmen sekolah, dan belum adanya kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan. Alternatif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, yaitu dengan membuat kebijakan khusus pada tingkat kabupaten/kota yang dapat digunakan sebagai payung hukum dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Di masa mendatang, diperlukan adanya mekanisme yang menjamin pelaksanaan EDS dilakukan secara obyektif, transparan, dan jujur serta mekanisme pengawasan-silang, sehingga menjamin netralitas dan obyektivitas hasil EDS.

Kata kunci: evaluasi diri, sekolah, penjaminan mutu, pengawas.

Abstract: This research concerned the implementation of School Self-Evaluation (SSE) with two objectives, namely: (1) to identify problems encountered during SSE implementation; and (2) to identify alternative solutions to overcome the problems. The method used was meta-analysis using both primary and secondary data. The primary data was obtained through the open-questionnaire given to teachers and principals from Primary Schools/Madrasah Ibtidaiyah, Junior Secondary Schools/Madrasah Tsanawiyah, Senior Secondary Schools/Madrasah Aliyah and Vocational Secondary Schools located in Bogor, Sukabumi, Bekasi, and Depok. The sources of secondary data were the guidelines of SSE implementation from few countries, media, official regulations, as well as related study reports. The study results showed that problems in SSE implementation comprised concepts, instrument, infrastructure, human resources, and administrative. Problems have been resulted from lack of socialization process, lack of school commitment, and lack of collaboration among stakeholders. To overcome those problems is to make special regulation at district/municipality level which could be used as official regulation for the process of planning, budgeting, and supervising. In the future, it is necessary to establish such a mechanism to ensure that SSE is conducted objectively, transparent, and honest, as well as the mechanism of cross-supervision to ensure the results of SSE being neutral and objective.

Keywords: self-evaluation, school, quality assurance, supervisor.

Pendahuluan

Perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan komitmen Pemerintah Indonesia yang diterapkan melalui berbagai program prioritas dan dituangkan dalam bentuk kebijakan, salah satunya berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2009). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) tersebut ada dua hal utama yang harus dilakukan untuk penjaminan mutu pendidikan, yakni: 1) melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS); dan 2) melakukan Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD). Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dimaksudkan sebagai proses pemetaan mutu sekolah oleh pihak sekolah sendiri secara jujur dan transparan, sehingga dapat ditemukan akar permasalahan yang dihadapi dalam penjaminan mutu pendidikan, yang selanjutnya bisa dirumuskan rekomendasi atau langkah nyata dalam penjaminan mutu pendidikan. EDS merupakan langkah proaktif untuk mengeliminasi ketidakjujuran sekolah dalam menghadapi evaluasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) atau Badan Akreditasi Provinsi (BAP). Sedangkan, Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004), sehingga pemerintah daerah dituntut mampu melakukan monitoring yang terkait dengan penjaminan mutu sekolah.

Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) pada kenyataannya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, khususnya terkait dengan perencanaan pengembangan sekolah dan manajemen berbasis sekolah. Berbagai pengalaman dan pengamatan menunjukkan adanya keluhan dari berbagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan EDS. Mustikasari (2011) mengatakan bahwa peran pengawas dalam implementasi EDS di satuan pendidikan dapat dikatakan belum optimal, meskipun tidak terjadi pada semua pengawas. Padahal dengan EDS memungkinkan sekolah untuk mampu

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan lebih lanjut. Di samping itu, dengan EDS, maka sekolah mampu mengenal peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan, menilai keberhasilan upaya peningkatan, dan melakukan penyesuaian program-program yang ada, serta mengetahui tantangan yang dihadapi dan mendiagnosis jenis kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan. Secara singkat, EDS memungkinkan masing-masing sekolah dapat membangun sistem informasi, terutama memotret kinerja sekolah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Informasi yang terbangun menjadi dasar untuk dapat perencanaan peningkatan mutu berkelanjutan dan pengembangan kebijakan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

EDS sesungguhnya terkait dengan proses perencanaan sekolah dan dipandang sebagai bagian yang penting dalam kinerja siklus pengembangan sekolah. Sebagai kerangka kerja untuk perubahan dan perbaikan, proses ini secara mendasar menjawab 3 (tiga) pertanyaan kunci, yaitu: 1) Seberapa baik kinerja suatu sekolah, 2) Bagaimana mengetahui kinerja suatu sekolah sesungguhnya, dan 3) Bagaimana memperbaiki dan meningkatkan kinerja sekolah. Pertanyaan kunci pertama diartikan bahwa dengan EDS akan diperoleh informasi mengenai pengelolaan sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembelian Sekolah/Rencana Kegiatan Sekolah (RPS/RKS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS). Pertanyaan kunci kedua diartikan bahwa dengan EDS akan diperoleh informasi tentang kinerja sekolah yang sebenarnya dan informasi tersebut diverifikasi dengan bukti-bukti fisik yang sesuai. Pertanyaan ketiga diartikan bahwa sekolah menggunakan informasi yang dikumpulkan dalam EDS untuk menetapkan apa yang menjadi prioritas bagi peningkatan sekolah dan digunakan untuk mempersiapkan RPS/RKS dan RAPBS/RKAS (Kementerian Pendidikan Nasional, 2009). Adanya EDS sekaligus secara tidak langsung dapat mendukung kepala sekolah untuk

lebih dapat melaksanakan kompetensi manajerialnya secara menyeluruh dan bermakna yang akan membantu peningkatan kinerja sekolah. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dimana kepala sekolah diharuskan untuk membangun budaya mutu pendidikan serta terpetakannya mutu pendidikan yang rinci pada satuan pendidikan melalui pelaksanaan EDS.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana penerapan EDS di sekolah. Adapun tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, dan mengidentifikasi solusi alternatif untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi.

Kajian Literatur

Evaluasi Diri Sekolah

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) merupakan suatu proses kolaborasi dan refleksi sebagai bagian dari revaluasi internal dalam persekolahan, yang sangat vital dalam pengembangan dan perubahan terhadap pengelolaan satuan pendidikan atau sekolah. EDS yang memfokuskan pada apa yang terjadi di sekolah akan melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru di bawah arahan komite sekolah atau yang sejenis dengan tetap berkonsultasi kepada orangtua. EDS memiliki beberapa tujuan penting (*Association of Professionals in Education and Children's Trusts Aspect*, 2005). Pertama, EDS merupakan indikator signifikan dari kinerja dan budaya sekolah, karena hasil EDS dapat menetapkan orientasi sekolah tertentu dan bagaimana mencapai orientasi dimaksud. Kedua, EDS dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan profesional guru-guru dan sekaligus memfasilitasi proses berbagi pengalaman. Ketiga, EDS dapat menjamin keberlangsungan program yang harus dijalankan di sekolah yang sudah disepakati, baik oleh pemangku kepentingan di lingkungan internal dan eksternal sekolah. Keempat, EDS dapat menjadi dasar pengembangan instrumen penilaian yang relevan dalam konteks kegiatan-kegiatan evaluasi dalam rangka perubahan mutu program yang diberikan kepada peserta didik.

MacBeath (2006) mengungkapkan bahwa evaluasi diri sekolah (EDS) memiliki beberapa tujuan, yaitu di antaranya untuk menaikkan standar, mengembangkan profesionalisme, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekolah. Standar secara sederhana diartikan sebagai skor pencapaian belajar peserta didik, sedangkan penafsiran lebih kompleks dimaksudkan sebagai tingkat efektivitas proses pembelajaran yang terjadi dengan penekanan pada aspek pedagogi. Mengembangkan profesionalisme dikaitkan dengan kepala sekolah dan guru-guru yang berada dalam sekolah tertentu di mana dengan adanya EDS, maka mereka dapat menjadi lebih sadar, lebih reflektif, dan lebih kritis terhadap kinerja dan pengembangan profesinya yang pada tahapan selanjutnya dapat mempengaruhi capaian belajar peserta didiknya. Terkait kapasitas sumber daya manusia sekolah diyakini, bahwa EDS memungkinkan setiap elemen yang ada pada suatu satuan pendidikan dapat merespon dan mengelola berbagai perubahan yang terjadi secara cepat, karena adanya kesadaran bahwa keberhasilan proses pembelajaran dan peningkatan mutu terjadi karena adanya sifat kritis, mau berubah, dan antisipatif.

Studi yang telah dilakukan oleh MacBeath dan Oduro (2005) untuk mengetahui persepsi guru terhadap pentingnya EDS yang dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus dengan diikuti oleh 192 guru pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Hasil diskusi menunjukkan bahwa meningkatkan standar mutu pembelajaran merupakan tujuan fundamental dari EDS. Guru-guru yang mengikuti diskusi dimaksud juga menyatakan bahwa EDS dapat membantu guru untuk melakukan evaluasi terhadap capaian belajar peserta didik, karena adanya instrumen-instrumen khusus yang mudah dipahami, baik oleh guru maupun peserta didik. Yang menarik dari diskusi ini adalah persepsi guru yang menganggap bahwa EDS bukan merupakan instrumen untuk membantu personil di sekolah dalam berbagi gagasan dan pengalaman-pengalaman dan bahkan EDS dianggap bukan merupakan media untuk mendengarkan pendapat dari peserta didik.

Studi yang dilakukan MacBeath dan Oduro (2005) tersebut juga menanyakan pihak-pihak yang seyogyanya dilibatkan. Terungkap bahwa

pihak yang dianggap paling penting dalam proses EDS adalah sekolah dan bukan orangtua, dinas pendidikan maupun media. Klarifikasi yang dilakukan terkait tidak pentingnya orangtua, dinas pendidikan maupun media, yaitu bahwa EDS merupakan urusan internal sekolah dan tidak menjadi konsumsi dari publik secara umum. Hal lain yang juga dibahas dalam studi tersebut adalah aspek-aspek yang difokuskan dalam EDS. Mayoritas dari peserta diskusi mengungkapkan bahwa aspek yang paling penting adalah motivasi dan perhatian peserta didik diikuti dengan kondisi sekolah dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran, serta mutu hubungan antara guru dan peserta didik. Hanya sedikit yang mendukung bahwa kinerja peserta didik dalam ujian sumatif maupun formatif menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam EDS. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi EDS merupakan dimensi lain dalam studi tersebut. Terungkap bahwa kepercayaan, kolegialitas, dan dukungan dari berbagai pihak merupakan faktor pendukung utama keberhasilan implementasi EDS, dan akuntabilitas tidak dianggap sebagai faktor yang kritis dalam implementasi EDS.

Evaluasi Diri Sekolah di Beberapa Negara

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang dipraktekkan di Irlandia dipercaya dapat memberdayakan komunitas sekolah untuk beberapa hal, yaitu mengafirmasi praktek terbaik, mengidentifikasi aspek yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan dan memutuskan aksi-aksi sebagai tindak-lanjut mewujudkan perubahan-perubahan tersebut. Adanya EDS memungkinkan kesempatan bagi para guru dan sekolah untuk mendeskripsikan kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman yang terjadi dari waktu ke waktu dalam lingkup mereka, termasuk memperkaya proses pembelajaran yang semua menguntungkan kinerja sekolah. EDS atau yang disebut *school self-evaluation (SSE)* menjadi media untuk mendekatkan sekolah dengan masyarakat sekitar di mana sekolah akan berbagi informasi tentang standar pembelajaran yang harus dicapai dalam berbagai dimensi pembelajaran, baik akademik, budaya, sosial dan kepribadian ([\[Publications/Evaluation-Reports-Guidelines/sse_guidelines_primary.pdf">Publications/Evaluation-Reports-Guidelines/sse_guidelines_primary.pdf\]\(#\), 2014\).](http://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-</p></div><div data-bbox=)

Negara bagian Victoria di Australia menerapkan evaluasi diri sekolah sebagai bagian penting dari proses peningkatan mutu secara berkesinambungan dan merupakan aspek vital dari Kerangka Penyempurnaan dan Akuntabilitas Sekolah (*School Accountability and Improvement Framework*). Persepsi yang berkembang adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS) memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat sekolah untuk merefleksikan capaian peserta didik dan strategi kunci peningkatan mutu, sekaligus memfokuskan hal yang seharusnya dilakukan sekolah agar dapat meningkatkan kinerja di masa mendatang. Proses refleksi ini sangat kritis dalam rangka menjamin perubahan yang berjalan. Komunitas sekolah dilibatkan dalam pelaksanaan evaluasi diri sekolah sebagai bentuk mekanisme yang sistematis, komprehensif dan rinci terhadap capaian sekolah yang difokuskan, antara lain pada pembelajaran peserta didik dan partisipasi peserta didik. Proses analisis dan refleksi ini dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan arah ke depan dalam perencanaan peningkatan mutu. EDS juga dianggap sebagai suatu kesempatan yang secara signifikan dapat menjadi forum diskusi, konsultasi dan umpan-balik antara kelompok yang ada dalam lingkup sekolah dengan harapan bahwa peserta didik, jajaran sekolah, dan orangtua dapat berperan serta sehingga kesepakatan sebagai kepemilikan bersama (*School Improvement Division, Department of Education and Early Childhood Development*, 2012).

Di Belanda, evaluasi diri sekolah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang tentang Pendidikan Dasar pada Pasal 10 dan 12 yang mempersyaratkan sekolah untuk menghasilkan laporan tahunan, rencana sekolah, dan panduan sekolah (*De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap*, 2011). Sekolah-sekolah diharuskan untuk melaporkan kepada orangtua peserta didik tentang tujuan-tujuan pendidikan dan hasil dari proses pendidikan setiap 4 tahun. Laporan tahunan pada kenyataannya cenderung lebih berisikan indikator keuangan dan tidak memberikan indikasi tentang mutu pendidikan sekolah secara keseluruhan

(Scheerens, Ehren, *Sleegers & de Leeuw*, 2012). Di negara ini, EDS merupakan aspek yang krusial dalam penjaminan mutu dan diasumsikan sebagai evaluasi internal sekolah. Hal ini diperkuat oleh pendapat Scheerens, Glas, Thomas & Thomas (2003) bahwa evaluasi diri sekolah merupakan "internal secara utuh" tetapi juga dapat terkait kapasitas eksternal yang mempengaruhi kinerja suatu sekolah. Yang utama yaitu bahwa sekolah merupakan inisiator sekaligus sebagai target utama dari evaluasi diri. Pengertian lain mengenai evaluasi diri sekolah dikemukakan oleh Voogt (1995), yaitu bahwa evaluasi diri sekolah adalah suatu prosedur untuk memperoleh informasi terkait disan dan tujuan-tujuan pendidikan untuk mengambil keputusan-keputusan kebijakan dalam rangka menjaga dan menjamin peningkatan mutu dari sekolah.

Evaluasi diri sekolah yang diterapkan di Dubai pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan sekolah serta untuk menjawab beberapa isu utama di antaranya: 1) apa saja program-program prioritas di sekolah, 2) bagaimana upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk mengimplementasikan program-program prioritas dimaksud, 3) bagaimana cara mengetahui bahwa program prioritas tersebut sudah dicapai, dan 4) bagaimana agar sekolah dapat menjamin bahwa program prioritas atau yang sudah direncanakan itu dapat diwujudkan (*Dubai Schools Inspection Bureau*, 2011). EDS di Dubai dimulai pada tahun 2008 dan pada saat itu banyak sekolah yang tidak menyadari kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya. Banyak kasus menunjukkan bahwa ternyata kepala sekolah tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai praktek-praktek terbaik, baik dalam konteks lokal maupun internasional dan yang lebih mengkhawatirkan ternyata para kepala sekolah kurang pengalaman dalam menggunakan berbagai sumber atau dokumen untuk membuktikan kinerja sekolah yang mereka pimpin. Terungkap bahwa antara tahun 2008 dan 2009 hampir sepertiga dari jumlah sekolah yang ada di Dubai belum mampu melaksanakan evaluasi diri sekolah yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut maka diterbitkan suatu panduan yang disebut *Dubai Schools Inspection Bureau (DSIB) Inspection Handbook* yang kemudian digunakan

oleh seluruh sekolah sebagai kerangka operasional sebelum dilakukan inspeksi atau supervisi ke sekolah-sekolah terkait evaluasi diri sekolah.

Kendala dalam pelaksanaan evaluasi diri sekolah juga terjadi dalam konteks persekolahan di Belanda. Suatu studi terhadap 27 sekolah dasar di Belanda telah dilakukan oleh Blok, Sleegers & Karsten (2008) dengan mempertimbangkan bahwa evaluasi diri sekolah merupakan bagian dari supervisi. Mereka menemukan bahwa EDS yang dilakukan sekolah sampel tersebut masih sangat rendah mutunya. Terungkap bahwa evaluasi diri sekolah merupakan kegiatan yang dirasakan sangat sulit bagi sekolah-sekolah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Secara khusus, faktor dimaksud yaitu persepsi dan sikap dari pihak internal sekolah sendiri yaitu dari kepala sekolah dan guru-guru. Rekomendasi yang diberikan adalah adanya fasilitasi dan dukungan dari pemangku kepentingan di luar sekolah dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekolah dalam jangka waktu tertentu agar dapat meningkatkan kinerja sekolah-sekolah tersebut. Schildkamp (2007) melakukan investigasi terhadap penggunaan hasil evaluasi diri sekolah setelah sekolah-sekolah tersebut berpartisipasi untuk menerapkan instrumen yang komprehensif dalam rangka evaluasi diri sekolah. Disimpulkan bahwa hanya sangat sedikit sekolah yang mampu memanfaatkan hasil-hasil EDS untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan lain-lain.

Evaluasi Diri Sekolah di Indonesia

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang dilakukan di Indonesia merupakan wujud komitmen untuk menjamin bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal telah melakukan penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menaikkan tingkat

kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang dilakukan merupakan proses yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan untuk membantu sekolah dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan indikator-indikator kunci. Melalui EDS kekuatan dan kemajuan sekolah dapat diketahui dan aspek-aspek yang memerlukan peningkatan dapat diidentifikasi. Dari hasil EDS dapat diperoleh informasi tentang kinerja sekolah, yaitu pengelolaan sekolah yang telah memenuhi SNP untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan RPS/RKS dan RAPBS/RKAS. Di samping itu, melalui EDS dapat diperoleh bukti-bukti kinerja sekolah secara fisik yang sesuai dan telah diverifikasi oleh berbagai pihak. Hasil EDS juga dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja sekolah, yaitu berupa penetapan program-program prioritas bagi peningkatan sekolah.

Terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh sekolah dari EDS. Pertama, sekolah mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan lebih lanjut. Kedua, sekolah mampu mengenal peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan, menilai keberhasilan upaya peningkatan, dan melakukan penyesuaian program-program yang ada. Ketiga, sekolah mampu mengetahui tantangan yang dihadapi dan mendiagnosis jenis kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan. Keempat, sekolah dapat mengetahui tingkat pencapaian kinerja berdasarkan 8 SNP. Kelima, sekolah dapat menyediakan laporan resmi kepada para pemangku kepentingan tentang kemajuan dan hasil yang dicapai.

Kebijakan pelaksanaan EDS oleh Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang disebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) merupakan upaya untuk terciptanya budaya mutu pendidikan dengan mendorong terlaksananya proses penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Sekolah diberikan peningkatan kapasitas untuk dapat melakukan EDS secara mandiri dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan mengacu kepada hasil EDS tersebut. Kebijakan dimaksud sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) (Kementerian

Pendidikan Nasional, 2009). Pemetaan mutu berbasis EDS ini telah dilakukan dengan sasaran terbatas sejak tahun 2010. Pada tahun 2013 pemetaan mutu pendidikan dengan mengikuti pola evaluasi diri sekolah (EDS) ini dilaksanakan dengan sasaran semua satuan pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Pemetaan ini diharapkan dapat berfungsi ganda sebagai acuan dalam melakukan evaluasi diri di tingkat sekolah serta sekaligus memetakan mutu pendidikan pada tingkat pusat maupun daerah (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, 2013).

Dari berbagai pengertian dan studi yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa evaluasi diri sekolah (EDS) sudah menjadi suatu kebijakan yang diterapkan pada persekolahan di berbagai negara dan negara bagian. Secara sederhana pengertian dari EDS adalah proses yang digunakan untuk mengukur kinerja sekolah dengan menggunakan instrumen terhadap beberapa aspek yang menyangkut, antara lain pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, proses penilaian, ketercapaian hasil belajar peserta didik. Penerapan EDS ternyata mengalami kendala, khususnya pada tahap-tahap awal yang diakibatkan oleh sejumlah faktor internal dan eksternal, khususnya menyangkut komitmen dan integritas berbagai pihak. Di samping itu, hasil EDS masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah-sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan "*ex post facto research*", karena menggunakan data dan informasi dari yang sudah terjadi dan sedang berlangsung. Dengan *ex post facto research*, peneliti mempertanyakan faktor-faktor yang kemungkinan dapat diasosiasikan dengan kejadian-kejadian atau kondisi-kondisi yang terjadi dan tidak terjadi (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). Adapun sumber data penelitian adalah paduan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu 58 (lima puluh delapan) guru-guru dan 4 (empat) kepala sekolah, yang berasal dari Bogor, Sukabumi, Bekasi dan Depok. Guru-guru tersebut

mengajar pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Responden guru dan kepala sekolah tersebut merupakan mahasiswa pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor Semester I tahun 2013/2014 untuk program studi Manajemen Pendidikan. Kuesioner bersifat terbuka dengan item pertanyaan yang berhubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) ditinjau dari aspek konsep, instrumen, infrastruktur, administrasi, dan sumber daya manusia (SDM), serta langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak sekolah dan dinas terkait untuk mengatasi kendala dimaksud.

Data sekunder berasal, antara lain dari dokumen terkait Evaluasi Diri Sekolah (EDS) di sejumlah negara, yaitu Australia, Irlandia, Belanda dan Dubai yang diasumsikan mewakili tingkat keberhasilan pendidikan, kultur pendidikan, dan geografi; serta laporan hasil-hasil penelitian tentang EDS serta informasi yang didapat dari berbagai media serta dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Data yang berasal dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan *meta-analysis*. Secara sederhana, *meta-analysis* dimaknai sebagai analisis terhadap berbagai analisis sebagaimana diungkapkan oleh Cohen, Manion & Morrison (2007), yaitu "*meta-analysis is, simply, the analysis of other analyses*" (halaman 291). Untuk dapat melakukan *meta-analysis* yang memiliki keakuratan data dan informasi, maka diperlukan tahapan untuk melakukan kodifikasi terhadap berbagai studi atau dokumen terkait agar tidak terjadi bias yang cukup besar terhadap masalah yang akan dikaji dalam suatu penelitian (Cooper, 2010). Kodifikasi tersebut dikategorikan atas kendala yang dihadapi dalam penerapan EDS, dan tindakan atau langkah yang harus diambil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Kendala dalam Penerapan EDS

Pertanyaan penelitian pertama terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang ditinjau atas kelompok aspek: konsep, instrumen, infrastruktur, administrasi, dan sumber daya manusia (SDM). Responden mengungkapkan bahwa terdapat persepsi yang berbeda di antara sekolah-sekolah terhadap konsep EDS. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, tujuan utama EDS adalah agar sekolah mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka serta mengidentifikasi bidang yang membutuhkan perbaikan. Kenyataannya adalah sekolah-sekolah cenderung membuat nilai EDS semaksimal mungkin, agar penilaian sekolah tidak buruk, sehingga budaya mutu menjadi target sampingan yang terkadang terlupakan. Selain itu, perbedaan persepsi antara guru dan sekolah, yaitu di mana guru beranggapan bahwa EDS yang ada digunakan bukan sebagai dasar penyusunan Rencana Penganggaran Sekolah (RPS). Persepsi yang lain, yaitu pada awalnya EDS dianggap sebagai beban tambahan baru yang membebankan tugas sekolah dan Tim Pengembangan Sekolah (TPS).

Terkait dengan instrumen, responden beranggapan bahwa instrumen EDS terlalu banyak, sehingga menimbulkan kejenuhan dalam pengisiannya, dan beberapa kali mengalami perubahan format, terutama pada saat sosialisasi sehingga membingungkan. Hal lain, yaitu pertanyaan yang tercantum di dalam instrumen EDS masih menimbulkan kerancuan atau penafsiran ganda; jumlah pertanyaan yang tidak mewakili ruang lingkup EDS sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi, kesulitan menjawab, dan banyak pertanyaan yang tidak diisi; dan isi pertanyaan yang tidak sesuai dengan status siswa, di mana bahasa pada instrumen yang diberikan kepada siswa dianggap terlalu tinggi. Juga terungkap bahwa instrumen bukan merupakan hasil *download* (unduh), dan timbul kesulitan dalam proses *upload* (unggah).

Aspek infrastruktur secara khusus dikaitkan dengan penggunaan Teknologi dan Informasi Komunikasi (TIK) dalam berbagai kegiatan EDS. Kendala yang ditemukan antara lain, yaitu masih ada sekolah yang memiliki keterbatasan dalam

sumber daya manusia dan fasilitas, dan lambatnya jaringan internet di beberapa sekolah untuk mengunggah data EDS *online*. Kalaupun telah memiliki fasilitas, permasalahan yang dihadapi adalah bahwa masih ada beberapa sekolah yang memiliki keterbatasan kemampuan operator. Mempertimbangkan aspek kompatibilitas, maka kendala yang dihadapi adalah 1) tidak sepenuhnya *compatible* dengan perangkat lunak yang digunakan terutama *Word*, 2) struktur *database* belum memudahkan untuk dapat diolah sehingga beberapa data tidak dapat terekam dengan baik, dan 3) waktu tunggu yang cukup lama untuk memasukkan ke dalam *database*.

Dari jawaban responden, terdapat paling tidak tujuh kendala terkait sumber daya manusia. Ketujuh kendala tersebut, yaitu: 1) tim pengembang sekolah masih lemah dalam pemahaman Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), sehingga untuk mengisi instrumen EDS mendapat kesulitan; 2) masih kurangnya pemahaman guru baik dalam mencerna pertanyaan maupun pengisian; 3) pengawas sebagai ujung tombak kegiatan secara emosi, kompetensi dan keberpihakannya masih belum cukup kuat untuk menggerakkan sekolah melakukan EDS; 4) tim pengawas tidak dapat bekerja secara efektif; 5) kemampuan SDM dalam menggunakan IT belum memenuhi standar, sehingga menimbulkan waktu tunggu dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan dan banyak petugas yang hanya menjadi *messenger* tidak melakukan verbal; 6) hanya sebagian kecil anggota TPS yang punya kemampuan dalam mengoperasikan komputer, padahal keterampilan menguasai teknik penggunaan komputer ini sangat penting dalam mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan data; dan 7) kepala sekolah sebagai ketua tim jarang hadir dalam kegiatan *workshop* padahal kehadiran kepala sekolah ini penting karena data dan sumber informasi lebih banyak dipegang oleh kepala sekolah dan kepala sekolah berperan penting untuk memotivasi anggota TPK lainnya untuk bekerja secara maksimal. Menurut responden, hal lain yang mengkhawatirkan, yaitu ada sebagian pengawas yang tidak benar-benar mendampingi sekolah binaannya untuk mengisi dan menganalisis EDS. Bahkan dijumpai pengawas yang

belum memahami apa, mengapa, dan bagaimana EDS. Sementara pengawas merupakan anggota tim pengembang sekolah, peran pengawas adalah membina sekolah dalam melakukan EDS sekaligus memonitor valid atau tidaknya data EDS, karena data ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan monitoring sekolah oleh pemerintah daerah (MSPD).

Terdapat sepuluh kendala yang dihadapi dalam penerapan EDS dikaitkan dengan aspek administrasi. Kendala-kendala dimaksud, yaitu 1) panduan belum lengkap; 2) sekolah tidak memiliki waktu untuk melaksanakan sehingga EDS cenderung dianggap beban tambahan sekolah; 3) pelaksanaan sampai pelaporan EDS dikerjakan oleh seorang guru; 4) hasil EDS belum dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS); 5) sempitnya waktu yang dialokasikan dalam sosialisasi, sehingga materi kegiatan sosialisasi tidak tersampaikan secara utuh dan lebih spesifik; 6) kurang lengkapnya kehadiran warga sekolah dalam kegiatan disebabkan karena berbenturan dengan kegiatan lain di sekolah sehingga pemahaman warga sekolah tentang hakekat, guna dan manfaat EDS ini tidak dipahami secara utuh oleh sebagian warga sekolah; 7) terfokusnya banyak pekerjaan pada individu tertentu dalam tim; 8) pelatihan belum optimal, sehingga pemahaman sekolah tentang Standar Nasional Pendidikan terutama mengenai indikator esensial untuk pengisian instrument EDS *online*, masih belum tuntas sehingga menimbulkan permasalahan pemahaman dan implementasi bervariasi, serta kesulitan dalam pengisian; 9) masih ada sekolah dalam membuat program tidak berdasarkan EDS. EDS hanya dianggap sebagai proyek dan terlepas dari kegiatan dan program sekolah berikutnya; dan 10) masih ada diantara sekolah yang takut mengisi data secara jujur karena masih ada anggapan EDS merupakan penilaian dan mengangkut kinerja dan prestasi sekolah.

Solusi Alternatif terhadap Kendala Penerapan EDS

Pertanyaan penelitian kedua, yaitu menyangkut solusi alternatif untuk mengatasi kendala-kendala yang ada yaitu berupa tindakan yang diambil oleh

berbagai pemangku kepentingan, baik dari internal maupun eksternal sekolah. Menurut responden, terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak internal—kepala sekolah dan komite sekolah—, dan pihak eksternal yaitu pemerintah daerah dan dinas pendidikan dalam pelaksanaan program EDS. Tindakan dari pihak internal sekolah meliputi: 1) sekolah hendaknya membuat perencanaan yang matang dalam melakukan sosialisasi sehingga tidak berbenturan dengan kegiatan lain di sekolah, 2) sekolah hendaknya memasukkan pelaksanaan EDS dalam kalender dinas pendidikan dan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan, dan 3) sekolah menumbuhkan rasa kepedulian dan tanggung jawab bahwa EDS merupakan kebutuhan semua warga sekolah. Tindakan lain dalam lingkup internal sekolah, yaitu melibatkan pengurus komite dalam Tim Pengembang Sekolah (TPS). Keberadaan pengurus komite dalam TPS akan sangat membantu dalam kelancaran pencarian data sehingga terkumpul data yang lengkap dan akurat. Lebih lanjut, responden mengungkapkan pentingnya memberikan bimbingan pada anggota TPS, khususnya terkait dengan kemampuan mengoperasikan komputer. Hal ini untuk mengatasi banyaknya keterlambatan penyelesaian laporan akhir EDS yang diakibatkan minimnya kemampuan TPS dalam mengoperasikan komputer, sehingga menghambat proses pengisian instrumen EDS *online*.

Tindakan terkait pihak eksternal yang utama dilakukan adalah membuat kebijakan/regulasi yang mendukung program EDS. Hal-hal yang perlu diatur dalam kebijakan tersebut, yaitu 1) kekerapan (frekuensi) kunjungan pengawas ke sekolah untuk mengawasi proses berjalannya program EDS, 2) mekanisme interaksi dan komunikasi yang berkualitas antara pengawas dengan para pemangku kepentingan di tingkat sekolah, 3) rasio proporsional antara pengawas dan jumlah sekolah pendamping dalam penerapan EDS, 4) optimalisasi keterlibatan pengawas dalam Tim Pengembang Sekolah (TPS), dan 5) peningkatan kompetensi pengawas sekolah. Responden juga mengungkapkan pentingnya peningkatan peran serta atau dukungan dari pihak dinas pendidikan daerah, yaitu dengan memberikan

sosialisasi lebih intensif kepada sekolah, bersifat terbuka dan membantu saat sekolah mengalami kesulitan dalam proses EDS serta lebih meningkatkan komunikasi dengan sekolah agar tidak terjadi salah persepsi.

Pembahasan

Kendala-kendala sebagaimana dideskripsikan pada bagian sebelumnya sesuai dengan temuan Ariani (2012) yang melakukan penelitian terhadap implementasi EDS dengan menggunakan daerah sampel di sejumlah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Ditemukan secara umum, bahwa masih ada pendamping yang belum memahami dan melaksanakan program Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dengan baik, khususnya di daerah terpencil. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah fasilitas pendukung dalam melaksanakan EDS cenderung sangat tidak memadai, bahkan tidak ada sama sekali. Kendala terkait infrastruktur yang ditemukan meliputi kesulitan yang besar untuk *upload* data EDS, jaringan internet di daerah sulit didapat, dan banyak sekolah yang tidak mempunyai komputer. Kendala terkait instrumen di antaranya, yaitu substansi untuk instrumen siswa yang di *print out* dan di EDS *online* tidak sama, bahasa yang digunakan pada instrumen siswa terlalu tinggi sehingga siswa sulit mengartikan, instrumen EDS *online* belum dapat sepenuhnya menggali informasi-informasi kelemahan pada sekolah, khususnya dalam pencapaian SNP hanya garis besarnya saja, dan sekolah sudah mempunyai dokumen silabus dan RPP, tetapi tidak tergal dibuat sendiri atau *copy paste* sehingga sulit mengisi instrumen mengenai standar proses. Sedangkan kendala terkait SDM meliputi rendahnya kemampuan/SDM pengawas dalam menggunakan IT, banyak sekolah yang tidak mempunyai operator, monitoring yang dilakukan oleh pengawas yang sudah dilatih Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Utara jarang dilakukan, sebagian pengawas tidak memahami fungsi *user* dan *password*. Kendala yang menyangkut administrasi, termasuk pendampingan oleh pengawas dilakukan bukan di sekolah binaannya sehingga komunikasi tidak lancar yang disebabkan pengawas tidak mengenal karakteristik sekolah, hasil EDS tidak bisa dilihat pengelolaan

datanya oleh pengawas, dan hasil EDS *online* tidak dapat langsung digunakan setiap kabupaten/kota sehingga kabupaten/kota tidak memahami pengelolaan data untuk dipetakan menjadi dasar peningkatan mutu pendidikan di kabupaten/kota.

Munculnya sejumlah kendala seperti di atas tampaknya secara mendasar merupakan implikasi dari tiga hal, yaitu: 1) pelaksanaan sosialisasi belum berhasil sepenuhnya, 2) komitmen sekolah melaksanakan EDS masih rendah karena masih belum merasakan manfaatnya, dan 3) kerja sama yang lebih erat dan komunikasi yang lebih intensif antara pendamping, pengawas, dan pihak sekolah masih belum terwujud. Belum berhasilnya sosialisasi diindikasikan oleh kenyataan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) masih belum dipahami dan terinternalisasi secara benar dan baik pada diri setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*). Komitmen yang masih rendah ditunjukkan oleh kenyataan bahwa sekolah-sekolah masih menggunakan pola kerja yang berorientasi kuantitas atau keterlaksanaan tugas menuju orientasi mutu/kualitas. Sedangkan belum ada kerja sama dan komunikasi ditunjukkan oleh indikasi bahwa program-program yang dilakukan berbagai instansi terkait masih sekedar berjalan atau hanya mencapai target kuantitas sehingga budaya mutu yang seharusnya dibangun tidak hanya di sekolah belum tercipta.

Untuk keberhasilan penerapan EDS maka optimalisasi dan kejelasan peran dari berbagai unsur yang duduk dalam Tim Pengembang Sekolah (TPS) juga menjadi isu penting. Apabila hal ini dapat dilakukan maka tidak terjadi adanya komite dan wakil orang tua pada sekolah yang hanya sekedar menghadiri kegiatan pengisian instrumen EDS dan tidak terlibat secara proaktif untuk memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran untuk mengisi dan menganalisis instrumen EDS. Sehubungan dengan hal tersebut maka, penunjukan komite dan wakil orang tua harus yang benar-benar memiliki komitmen dan kapasitas untuk turut mengembangkan sekolah melalui kegiatan EDS sehingga bukan hanya sekedar tertulis dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah. Dengan keterlibatan komite dan orang tua akan membuat mereka memahami kondisi sekolah dan kondisi yang harus dicapai sekolah,

yang selanjutnya dapat memunculkan komitmen dan tanggung jawab yang lebih tinggi untuk turut serta mengembangkan sekolahnya.

Menarik untuk mengutip argumentasi Mustikasari (2011) yang menyatakan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan dapat terimplementasi sesuai yang diharapkan dan mampu meningkatkan mutu pendidikan apabila didukung oleh adanya komitmen dari semua pihak terkait. Dengan perannya sebagai ujung tombak penjaminan mutu, sekolah memerlukan dukungan dari berbagai pihak terkait. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh sekolah seharusnya didukung, khususnya oleh pemerintah daerah pada tingkat provinsi/kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Di satu sisi, sekolah harus berupaya meningkatkan perannya sebagai ujung tombak penjaminan mutu pendidikan. Di sisi lain, instansi terkait lainnya harus menjalankan peran sesuai wewenangnya masing-masing yang bermuara pada terwujudnya penjaminan mutu pendidikan. Hal tersebut harus diakui bukan sebuah pekerjaan yang mudah tetapi membutuhkan kerja keras dan usaha. Tidak akan ada artinya ketika sistem sudah baik tetapi SDM yang ada tidak memiliki komitmen untuk mencapai mutu. LPMP bersama dengan pengawas, misalnya dapat membuat buku petunjuk atau buku pedoman dalam pelaksanaan EDS. Buku petunjuk ini dapat membantu TPS dalam pengisian instrumen. Jika ada kendala bisa langsung membuka buku petunjuk tanda berkomunikasi dengan narasumber atau tim ahli. Buku petunjuk ini bisa digunakan secara berkelanjutan untuk kegiatan EDS berikutnya.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan: Pertama, penerapan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) masih menemukan sejumlah kendala. Kendala tersebut menyangkut konsep, instrumen yang digunakan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan administrasi. Yang sangat kritis adalah bahwa pihak internal maupun eksternal sekolah masih belum memiliki kesamaan persepsi tentang pentingnya EDS sebagai salah

satu instrumen dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Kendala-kendala yang muncul pada hakekatnya merupakan akibat dari tidak berhasilnya sosialisasi yang dilaksanakan, kurangnya komitmen sekolah untuk menerapkan EDS, dan belum adanya dukungan penuh dari pemangku kepentingan lain untuk keberhasilan penerapan EDS di sekolah.

Kedua, untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan EDS mensyaratkan adanya sinergi, koordinasi dan komitmen antara pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun pusat sesuai dengan wewenang masing-masing. Keberadaan kebijakan khusus untuk penerapan EDS dalam bentuk peraturan daerah, baik peraturan bupati atau peraturan walikota, menjadi salah satu alternatif solusi yang efektif. Peraturan dimaksud menjadi payung hukum untuk memberdayakan dan mengoptimalkan peran pengawas sekolah dalam penerapan EDS dengan rasio pengawas dan sekolah dampingan yang proporsional. Peraturan dimaksud sekaligus menjadi dasar bagi sekolah untuk mengusulkan dalam penganggaran sekolah untuk menjamin pelaksanaan EDS yang efektif, efisien dan akuntabel.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas dan mengingat adanya variasi pemahaman dan komitmen dalam penerapan EDS selama ini, disarankan beberapa

hal berikut: Pertama, perlu adanya suatu mekanisme penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) yang mengaitkan status penerapan EDS dengan pengusulan rencana anggaran belanja sekolah yang memerlukan persetujuan dari institusi terkait. Artinya bahwa pemerintah daerah harus mengembangkan sistem pengawasan yang dapat menjamin bahwa besarnya alokasi anggaran yang berhak diterima sekolah memang didasarkan atas proses EDS yang obyektif, transparan, dan jujur. Hal ini penting, mengingat bahwa kecenderungan yang terjadi selama ini adalah sekolah sengaja membuat nilai EDS serendah mungkin agar mendapat bantuan dana dari pemerintah daerah, tetapi akan mengupayakan yang terbaik apabila dilakukan proses visitasi dalam kerangka sistem akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP).

Kedua, untuk menjaga netralitas dan obyektivitas hasil pelaksanaan EDS perlu dipertimbangkan suatu mekanisme penunjukan pengawasan silang. Artinya bahwa pengawas yang mempunyai wilayah kepengawasan pada sekolah-sekolah tertentu ditugasi pada sekolah-sekolah yang bukan dalam wewenang kepengawasannya pada waktu EDS. Mekanisme seperti ini diperkirakan dapat menjadikan sekolah-sekolah menjadi lebih bersungguh-sungguh dan berhati-hati untuk melakukan pengisian terhadap instrumen yang tersedia.

Pustaka Acuan

- Ariani, P. 2013. "Semangat Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) & Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) bagi Pengawas di Daerah Terpencil". <http://lpmp-sumut.or.id/1/?p=1085>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2014.
- Association of Professionals in Education and Children's Trusts (Aspect). 2005. *School Self-Evaluation: A Process of Change*. West Yorkshire, UK: Association of Professionals in Education and Children's Trusts (Aspect).
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. 2013. *Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan Tahun 2013*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Blok, H., Slegers, P., & Karsten, S. 2008. Looking for a Balance Between Internal and External Evaluation of School Quality: Evaluation of the SVI Model. *Journal of Education Policy*, 23(4), 379-395.

- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. 2007. *Research Methods in Education*. New York: Routledge.
- Cooper, H. 2010. *Research Synthesis and Meta-analysis: A Step-by-Step Approach* (4th ed.). London: SAGE Publications Ltd.
- De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 2011. *Wet op het Primair Onderwijs*. The Netherlands: De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Dubai Schools Inspection Bureau. 2011. *Self-Evaluation: An on-line Resource for Schools*. Dubai: Knowledge and Human Development Authority, Government of Dubai
- School Self-Evaluation Guidelines for Primary Schools. 2014. http://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/Evaluation-Reports-Guidelines/sse_guidelines_primary.pdf. "School Self-Evaluation Guidelines for Primary Schools: Inspectorate Guidelines for Schools". Diakses pada tanggal 15 Januari 2014.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2009. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- MacBeath, J. 2006. *School Inspection and Self-Evaluation: Working with the New Relationship*. Abingdon, Oxon: Routledge.
- MacBeath, J. dan Oduro, G. 2005. *Self-Evaluation and Inspection: A New Relationship?* London: National Union of Teachers.
- Mustikasari, A. 2011. "Ujung Tombak Penjaminan Mutu Pendidik". <http://edu-articles.com/ujung-tombak-penjaminan-mutu-pendidikan/> Diakses pada tanggal 1 Februari 2014.
- Scheerens, J., Ehren, M., Slegers, P., & de Leeuw, R. 2012. *OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes (Country Background Report for the Netherlands. June 2012)*. The Netherlands: University of Twente
- Scheerens, J., Glas, C. A. W., Thomas, S. M., & Thomas, S. 2003. *Educational Evaluation, Assessment, and Monitoring: A Systemic Approach* (Vol. 13): Taylor & Francis.
- Schildkamp, K. 2007. *The Utilisation of a Self-Evaluation Instrument for Primary Education*. The Netherlands: University of Twente.
- School Improvement Division, Department of Education and Early Childhood Development. 2012. *School Self-Evaluation Guidelines 2012*. Melbourne: Department of Education and Early Childhood Development.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Voogt, J.C. 1995. Schooldiagnose. In H. P. M. Cremers (Ed.), *Onderwijskundig Lexicon*. Alphen aan den Rijn: Samsom.